

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu strategi yang dapat diadopsi oleh suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak terkecuali bagi Indonesia, sebuah negara berkembang yang sedang berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakatnya. Di harapkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan mendukung pembangunan yang berkesinambungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara konvensional, pembangunan dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan ekonomi nasional untuk menciptakan dan memelihara peningkatan Pendapatan Nasional Bruto atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya (Todaro, 2004).

Salah satu cara untuk menilai efektivitas pembangunan dalam suatu negara adalah melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ini mencerminkan hasil dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah. Menurut Boediono (1999), pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan tingkat pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai proses peningkatan output per individu dalam jangka panjang dan merupakan indikator keberhasilan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi ekonomi suatu negara dan menjadi penanda keberhasilan pembangunan. Secara umum, pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan

kemampuan suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa, dan merupakan indikator penting dalam menganalisis perkembangan ekonomi. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam konteks regional, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDB adalah nilai pasar total dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama periode waktu tertentu. Oleh karena itu, kondisi yang ideal bagi pertumbuhan ekonomi atau PDB adalah mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja (Perwithosuci & Irsyad Fadilah, 2023). Pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai proses meningkatnya kapasitas perekonomian yang tercermin dalam peningkatan pendapatan nasional (Mankiw, 2018).

Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada saat pandemic *covid-19*. Pandemic ini telah mengakibatkan kematian lebih dari 85 juta jiwa dan menyebabkan krisis Kesehatan dan kemanusiaan. Krisis ini berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai belahan dunia. Hal ini berdampak sangat luar biasa terhadap Indonesia. Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Tahun Anggaran 2020, baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara maupun sisi pembiayaan (Nugraha, dkk., 2023).

Pandemi Covid-19 telah menghambat aktivitas ekonomi dan menimbulkan tekanan pada pertumbuhan ekonomi global ke depan, termasuk di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan pendapatan nasional secara agregatif atau peningkatan output dalam suatu periode tertentu,

dan merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu.

Pertumbuhan tersebut bisa dilihat dari peningkatan produksi barang industri, pembangunan sekolah, peningkatan infrastruktur, pertumbuhan sektor jasa, dan peningkatan produksi barang modal. Namun, kebijakan lockdown yang diterapkan oleh banyak negara untuk memerangi penyebaran Covid-19 telah mempengaruhi ekonomi Indonesia. Dampaknya antara lain sulitnya mencari pekerjaan dan banyak karyawan yang terpaksa dirumahkan tanpa gaji, sehingga negara mengalami kerugian yang signifikan. Di sisi lain, dampak dari Covid-19 juga menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pembangunan ekonomi adalah usaha yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan maksud untuk meningkatkan mutu kehidupan. Peningkatan tersebut berhubungan dengan pertumbuhan pendapatan per individu dalam jangka waktu yang panjang, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Ide pembangunan ekonomi mencakup peningkatan ketersediaan barang-barang yang mendukung kebutuhan hidup, distribusi yang lebih merata, peningkatan standar hidup, serta perluasan opsi ekonomi dan sosial (Todaro dan Smith, 2011).

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur utama keberhasilan aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Saat sebuah negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, hal tersebut mencerminkan keberhasilan

atau kemajuan dalam aktivitas perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mencerminkan kemajuan, perkembangan, kesejahteraan, dan perubahan fundamental dalam jangka waktu yang relatif panjang. Selain sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan ekonomi suatu negara, pertumbuhan ekonomi juga menjadi penanda kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menandakan adanya perkembangan dalam aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Purnamasari et al., 2020). Pertumbuhan ekonomi adalah satu dari beberapa tujuan dalam pembangunan ekonomi, bersama dengan pemerataan dan stabilitas. Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai petunjuk hasil pembangunan yang telah terjadi dan juga untuk menentukan arah pembangunan di masa depan. Hal ini merupakan permasalahan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang menuju peningkatan kapasitas produksi, yang tercermin dalam peningkatan pendapatan nasional (Maduwu dkk., 2021).

Peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur melalui PDRB sering menjadi penanda utama pertumbuhan ekonomi dalam pemerintahan daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah pada dasarnya melibatkan interaksi antara berbagai faktor, termasuk sumber daya manusia, alam, teknologi, modal, dan faktor lainnya. Manusia memiliki peran krusial dalam proses ini, baik sebagai tenaga kerja, pelaku pembangunan, konsumen, maupun input dari pembangunan itu sendiri. Keberhasilan pembangunan ekonomi di negara berkembang sering diukur dengan tingginya pertumbuhan ekonomi dan

peningkatan lapangan kerja. Pendekatan pertumbuhan ekonomi sering digunakan di berbagai daerah untuk mengembangkan sektor ekonomi lokal dengan harapan dapat meningkatkan lapangan kerja.

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian upaya untuk meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa yang sering kali diukur melalui tingkat penyerapan per kapita. Penyerapan tenaga kerja yang meningkat akan mengurangi tingkat kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah di setiap negara, termasuk Indonesia, terlibat dalam reformasi terkait isu ketenagakerjaan. Pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta untuk menciptakan peluang kerja dan menampung (Muslihatinningsih et al., 2020).

Menurut perspektif Islam, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, penting untuk memastikan bahwa tujuan dan sarana yang digunakan sejalan dengan nilai dan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun begitu, semua kebijakan yang diterapkan haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah tersebut. Konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam telah diuraikan dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang disebutkan dalam surat tersebut. - QS. At-Taubah Ayat 105 :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : *“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah. Penafsiran ini didukung oleh QS. At-Taubah Ayat 105 dalam ajaran Islam, di mana Allah memerintahkan umat-Nya untuk menjalankan ibadah wajib seperti shalat, sambil tetap berupaya dan bekerja keras untuk memperoleh rezeki yang halal. Dalam ajaran Islam, kedisiplinan dalam menjalankan ibadah dan ketekunan dalam bekerja dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Perintah untuk selalu mengingat Allah atas segala nikmat-Nya menunjukkan pentingnya sikap bersyukur dan keterhubungan spiritual dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam mencari nafkah. Dalam konteks persaingan sengit untuk mendapatkan pekerjaan, perintah untuk senantiasa mengingat Allah diharapkan dapat memberikan kekuatan dan ketabahan kepada hamba-Nya, sehingga mereka tidak mudah putus asa. Kesadaran akan tingginya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan juga menjadi pengingat akan pentingnya usaha, doa, dan ketergantungan pada Allah dalam setiap langkah hidup.

Menurut Abdul Halim, (2012:94) di era reformasi saat ini, pemberian otonomi kepada daerah sangat penting. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan lokal dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan publik agar lebih efisien, serta mengurangi disparitas antara kebutuhan masyarakat setempat dengan potensi dan karakteristiknya. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah memiliki dampak besar terhadap kemajuan wilayah yang pada gilirannya memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperkuat ekonomi daerah, pemerintah

lokal lebih memfokuskan upayanya pada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang dapat mendukung langkah-langkah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber sumber keuangannya sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang semakin baik demi kesejahteraan masyarakatnya (Chatira et al., 2020).

Di Indonesia, sistem pendidikan nasional diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menetapkan fungsi dan tujuan pendidikan. Fungsi utama pendidikan di Indonesia adalah untuk mengatasi berbagai bentuk penderitaan masyarakat yang disebabkan oleh kebodohan dan keterbelakangan, dengan mengembangkan kemampuan serta memperkuat nilai-nilai moral dan kemajuan bangsa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan diakui sebagai investasi yang paling bermanfaat bagi pembangunan ekonomi suatu negara, sebagaimana diungkapkan oleh Sukirno (2004). Pendidikan dianggap sebagai investasi pembangunan yang hasilnya akan dinikmati di masa depan. Oleh karena itu, hal ini menandakan pentingnya pendidikan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana pendidikan memiliki peran krusial dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui peningkatan keterampilan. Pendidikan diharapkan dapat mengatasi

masalah ekonomi dengan meningkatkan kemampuan manusia, sehingga meningkatkan kesejahteraan.

Pendidikan dianggap sebagai salah satu bentuk investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, yang dikenal sebagai Human Capital (teori modal manusia). Investasi dalam pendidikan dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas manusia, di mana nilai kapasitas manusia setelah mengikuti pendidikan, dalam berbagai bentuk dan jenisnya, diharapkan dapat meningkatkan nilai-nilai seperti peningkatan penghasilan individu, produktivitas kerja yang lebih tinggi, dan peningkatan nilai sosial individu dibandingkan sebelumnya sebelum mendapatkan Pendidikan (Bachtiar, 2019).

Pertumbuhan jumlah pekerja dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja sebagai motor penggerak dalam aktivitas ekonomi dilengkapi dengan keahlian dan keterampilan yang bertujuan untuk mempermudah proses produksi, distribusi, dan kegiatan lainnya. Semakin banyak jumlah tenaga kerja, maka produksi akan meningkat. Menurut Aristy (2018), peranan tenaga kerja dalam proses produksi sangat penting, dan kelangsungan proses tersebut sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kerja. Namun, beberapa aspek terkait dengan tenaga kerja dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti tingginya tingkat pengangguran, pertumbuhan cepat jumlah angkatan kerja, rendahnya kualitas tenaga kerja, dan sebagainya. Kendala-kendala ini dapat menjadi penghalang bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, peran pemerintah dianggap penting dalam mengatasi masalah-masalah terkait tenaga kerja tersebut.

Menurut (El Paso 2013), ada beberapa faktor yang memengaruhi produksi, di antaranya yang paling utama adalah manusia atau tenaga kerja sebagai penggerak utama. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, peran tenaga kerja dinilai melalui kontribusi atau nilai hasil produksinya. Kontribusi ini dipengaruhi oleh kondisi sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja itu sendiri. Ketika kualitas tenaga kerja dianggap "tinggi", nilai yang diterima oleh tenaga kerja tersebut juga akan lebih tinggi. Sebagai contoh, profesi dokter akan mendapatkan upah yang berbeda dengan buruh pabrik. Kuantitas dan kualitas tenaga kerja merupakan faktor kunci yang menentukan tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi. Akumulasi pesat angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan yang terbatas akan menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja dan peningkatan tingkat pengangguran. Dampak langsung dan tidak langsung dari masalah ketenagakerjaan ini mencakup ketidakmerataan pendapatan, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan instabilitas politik. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat digunakan sebagai panduan dalam merancang langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan (Perwithosuci & Irsyad Fadilah, 2023).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki peran krusial dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah dan dapat menjadi acuan untuk menetapkan arah pembangunan di masa depan. Namun, kondisi geografis dan sumber daya alam yang beragam di Indonesia menciptakan disparitas antara daerah yang lebih makmur dan maju dengan yang lainnya. Pertumbuhan

ekonomi suatu negara umumnya didorong oleh pertumbuhan ekonomi di setiap wilayahnya. Pertumbuhan ekonomi daerah tercermin dalam nilai PDRB, yang mengukur nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu tahun menggunakan faktor produksi yang tersedia di daerah tersebut. Nilai PDRB tersebut mencerminkan tingkat kemajuan pembangunan daerah tersebut. Biasanya, PDRB dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu PDRB nominal dan PDRB riil. PDRB nominal mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga berlaku pada tahun tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator penting yang membantu dalam memahami perkembangan ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu, baik berdasarkan harga aktual maupun harga yang disesuaikan. PDRB pada dasarnya mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha di daerah tersebut.

Nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari produksi harus setara dengan nilai barang yang digunakan. PDRB atas harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode tersebut, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai acuan. PDRB atas harga berlaku digunakan untuk menganalisis sebaran dan struktur ekonomi daerah, sementara PDRB atas harga konstan berguna untuk menilai kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari waktu ke waktu, tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga. PDRB juga dapat membantu dalam memahami perubahan harga dengan menghitung deflator

PDRB, yaitu perbandingan antara PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas harga konstan. Untuk menghitung PDRB, terdapat tiga pendekatan konseptual yang digunakan: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan (Bachtiar, 2019).

**Tabel 1. 1**

PDRB Tahun 2018 - 2022

<b>Tahun</b>	<b>Milyar Rupiah</b>
2018	10.537.736.552,49
2019	11.062.070.612,47
2020	10.837.540.833,02
2021	11.239.293.690,82
2022	11.839.781.486,93

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2024.

Berdasarkan pada gambar 1.1 menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS), Data dalam Tabel 1.1 menunjukkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam miliar Rupiah untuk periode tahun 2018 hingga 2022. PDRB merupakan indikator ekonomi yang mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah selama satu tahun. Pada tahun 2018, PDRB mencapai 10.537.736.552,49 miliar Rupiah, sedangkan pada tahun 2019 naik menjadi 11.062.070.612,47 miliar Rupiah. Namun, terjadi sedikit penurunan pada tahun 2020 menjadi 10.837.540.833,02 miliar Rupiah, sebelum kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 11.239.293.690,82 miliar Rupiah. Pada tahun 2022, nilai PDRB meningkat menjadi 11.839.781.486,93 miliar Rupiah, menunjukkan adanya peningkatan ekonomi dari tahun ke tahun,

meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Data ini dapat digunakan untuk menganalisis tren pertumbuhan ekonomi suatu daerah selama periode waktu yang ditetapkan.

Pemerintah berupaya mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi dengan tidak hanya mengembangkan PDRB, tetapi juga dengan meningkatkan efektivitas system pendapatan melalui kebijakan pendapatan asli daerah. Implementasi kebijakan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan lokal dengan memanfaatkan sumber-sumber potensial yang dimiliki oleh daerah tersebut. Tujuan dari implementasi kebijakan PAD adalah untuk mengurangi ketergantungan daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat serta meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Menurut Halim Setiyawati (2007), Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh oleh suatu daerah dari sumber-sumber yang berada di wilayahnya sendiri, yang dikumpulkan berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada penerimaan yang diperoleh oleh daerah dari aktivitas yang dipungut berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Sulaeman & Silvia, 2019).

**Tabel 1. 2**

PAD Tahun 2018 – 2022

<b>Tahun</b>	<b>Milyar Rupiah</b>
2018	272.981,06
2019	293.659,55
2020	264.065,97
2021	297.009,78
2022	328.299,28

Sumber: DJPK Kemenkeu 2024

Berdasarkan tabel 1.2 menjelaskan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam miliar Rupiah untuk rentang waktu 2018 hingga 2022. PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah dari berbagai sumber dalam wilayahnya sendiri, yang diatur dan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan data dalam tabel, terdapat tren peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, PAD mencapai 272.981,06 miliar Rupiah, yang kemudian meningkat menjadi 293.659,55 miliar Rupiah pada tahun 2019. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi 264.065,97 miliar Rupiah sebelum kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 297.009,78 miliar Rupiah. Pada tahun 2022, pendapatan asli daerah mencapai puncaknya dengan nilai 328.299,28 miliar Rupiah. Data ini memberikan gambaran tentang kinerja keuangan daerah dalam menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber lokal dalam periode lima tahun tersebut. Analisis lebih lanjut terhadap tren ini dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi pendapatan asli daerah serta implikasinya terhadap keuangan dan pembangunan di tingkat lokal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendidikan menjadi indikator penting dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Di samping itu, peningkatan sektor pendidikan memiliki dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui sektor pendidikan, individu dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuannya. Akibatnya, hal tersebut dapat membantu mereka memasuki dunia kerja. Seseorang yang memiliki keterampilan yang baik cenderung mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi.

**Tabel 1.3**

Pendidikan tahun 2018 – 2022

Tahun	Persen
2018	97,56
2019	97,71
2020	97,81
2021	97,82
2022	96,35

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2024.

Berdasarkan tabel 1.3 menjelaskan persentase partisipasi pendidikan di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022. Partisipasi pendidikan mengindikasikan seberapa besar proporsi populasi yang terlibat dalam sistem pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Data dalam tabel menunjukkan fluktuasi tingkat partisipasi pendidikan selama lima tahun tersebut. Pada tahun 2018, tingkat partisipasi mencapai 97,56%, mengalami kenaikan kecil pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 97,71% dan 97,81% secara berturut-turut. Namun, pada tahun 2021, terdapat peningkatan kecil menjadi 97,82%. Di tahun 2022, terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 96,35%. Data ini memberikan gambaran tentang seberapa besar populasi yang terlibat dalam pendidikan di Indonesia selama lima tahun. Analisis lebih lanjut terhadap pola ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pendidikan dan dampaknya terhadap pembangunan pendidikan di negara ini.

Menurut Todaro (2006), tenaga kerja dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga kerja yang produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar.

**Tabel 1. 4**

Tenaga Kerja tahun 2018 – 2022

<b>Tahun</b>	<b>Milyar Rupiah</b>
2018	43,02
2019	44,12
2020	39,53
2021	40,55
2022	40,69

Sumber : BPS Indonesia 2024

Berdasarkan Tabel 1.4 menjelaskan data mengenai jumlah tenaga kerja di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2022. Data ini disajikan dalam miliar Rupiah. Berdasarkan data dalam tabel, terlihat bahwa jumlah tenaga kerja mengalami variasi selama periode lima tahun tersebut. Pada tahun 2018, jumlah tenaga kerja mencapai 43,02 miliar Rupiah, yang mengalami peningkatan kecil menjadi 44,12 miliar Rupiah pada tahun 2019. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2020 menjadi 39,53 miliar Rupiah sebelum mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 40,55 miliar Rupiah dan 40,69 miliar Rupiah secara berturut-turut. Data ini memberikan gambaran tentang tren jumlah tenaga kerja di Indonesia selama periode lima tahun. Analisis lebih lanjut terhadap data ini dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tenaga kerja serta implikasinya terhadap pasar tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi negara.

Tenaga kerja merujuk pada penduduk suatu negara yang berusia kerja, yaitu dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun, yang memiliki kapasitas untuk

memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan akan tenaga mereka serta jika mereka bersedia untuk berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Pengertian ini merujuk pada siapa pun yang memiliki kemampuan untuk bekerja, sehingga terdapat beragam pendapat mengenai usia tenaga kerja. Beberapa berpendapat bahwa usia tenaga kerja dimulai dari 17 tahun, ada yang menganggapnya dimulai dari usia 20 tahun, dan bahkan ada yang berpendapat dimulai dari usia 7 tahun karena anak jalanan pun dianggap sebagai bagian dari angkatan kerja.

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, tenaga kerja didefinisikan sebagai "setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan demi menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun untuk kebutuhan masyarakat." Secara umum, penduduk dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Ketika penduduk telah mencapai usia produktif, mereka dapat dianggap sebagai bagian dari golongan tenaga kerja.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendidikan (P) dan Tenaga Kerja (TK), terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini berjudul **“Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2018-2022”**.

## **B. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini, peneliti menyadari terdapat beberapa keterbatasan antara lain, masih kurangnya pemahaman peneliti, maka peneliti mengharapkan

adanya kritik, saran, dan masukan. Berikut keterbatasan yang terdapat dalam penelitian :

1. Peneliti hanya menggunakan periode waktu 5 tahun, yaitu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Hal ini karena keterbatasan dalam akses data.
2. Penelitian ini hanya mempergunakan 3 variabel independent, yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendidikan, dan Tenaga Kerja.
3. Lokasi dalam penelitian ini terbatas pada 34 provinsi di Indonesia.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia tahun 2018 – 2022.
2. Bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia tahun 2018 – 2022.
3. Bagaimana pengaruh Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia tahun 2018 – 2022.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia tahun 2018 – 2022.
2. Menganalisis pengaruh Pendidikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia tahun 2018 – 2022.
3. Menganalisis pengaruh Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia tahun 2018 – 2022.

## **E. Manfaat Penulis**

### **1. Bagi Penulis**

Melalui penelitian ini Penulis dapat meningkatkan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, dan Penulis dapat mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Pendidikan, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

### **2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan tinjauan bagi pemerintah dalam merencanakan kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini membantu pemerintah memahami lebih mendalam tentang langkah-langkah kebijakan yang dapat diambil selanjutnya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

### **3. Bagi Akademisi**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang berguna bagi pembaca dan para pengambil keputusan tentang Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dan membantu memberikan informasi kepada peneliti selanjutnya yang masi memiliki hubungan dengan masalah Pertumbuhan Ekonomi.